PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KASUS KORUPSI

Kejari Pastikan akan Melanjutkan

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Mempawah membantah tudingan menguapnya kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Mempawah tahun anggaran 2012-2014. Lembaga korp baju coklat ini memastikan proses penyelidikan masih berlangsung. Saat ini, pihaknya masih menunggu perhitungan kerugiaan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kami sudah beberapa kali datang ke BPK untuk mengetahui perkembangan hasil audit.

"Berkaitan dengan kasus dugaan korupsi perjalanan Dinas DPRD Mempawah, masih dalam tahap penyelidikan. Makanya, sampai saat ini kami belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut," terang Kasi Intelijen Kejari Mempawah, Rustamaji Yudica Adi Nugraha, SH diruang kerjanya, Selasa (12/2) siang.

Sebab, lanjut Rustamaji, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lembaga berwenang yakni BPK untuk memastikan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus di lembaga wakil rakyat Kabupaten Mempawah itu.

"Kemarin, angka Rp 2,5 milyar itu merupakan hasil audit BPK dalam konteks pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. Sedangkan saat ini, kita perlu melakukan audit ulang untuk penindakan laporan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai lamanya proses perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut mengingat penggunaan anggaran tidak hanya fokus pada satu tahun. Melainkan terdiri dari beberapa tahun anggaran sejak 2012-2014.

"Jika hasil audit BPK sudah keluar, pasti akan kita tindaklanjuti pada tahapan berikutnya. Maka, selama hasil audit ini belum ada maka kita hanya bisa menunggu. Semoga saja dalam waktu tidak terlalu lama sudah keluar hasil audit tersebut," harapnya.

Selain itu, Kasi Intel menduga lamanya proses perhitungan kerugian negara tersebut dikarenakan banyaknya daftar kasus yang harus ditangani BPK. Sehingga, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas ini harus masuk dalam daftar antrian yang panjang. "Daftar kasus yang harus di audit BPK pastinya sangat banyak. Makanya, kita harus sabar menunggu," pendapatnya.

Tak hanya kasus perjalanan dinas DPRD Mempawah, Rustamaji mengungkapkan kasus korupsi lain yang juga masih dalam tahap penyelidikan dan menunggu hasil audit BPK yakni proyek pembangunan jalan Desa Pasir.

"Kami sudah beberapa kali datang ke BPK untuk mengetahui perkembangan hasil audit. Termasuk juga menanyakan apa saja kekurangan data atau dokumen yang diperlukan untuk penanganan kasus-kasus ini. dan jika memang ada kekurangan data, secepatnya akan kita penuhi agar proses perhitungan BPK secepatnya tuntas," tegasnya.

Karenanya, dia meminta masyarakat Kabupaten Mempawah bersabar menunggu proses hukum kasus dugaan tindakan pidana korupsi itu. Dia memastikan Kejari Mempawah berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dan memberantas segala bentuk korupsi di wilayah hukumnya.

"Kami akan bekerja maksimal untuk menegakan supremasi hukum di masyarakat. Yang pasti, kasus-kasus ini masih berlanjut sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku," tukasnya. ***(wah)***